



Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia

PENGUATAN KELEMBAGAAN SUB URUSAN JASA KONSTRUKSI DI DAERAH

IR. SUPRAYITNO, M.SI

DIREKTUR SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH II

Rabu, 3 September 2025



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri



kemendagri



1

DASAR HUKUM

2

URGENSI &
TANTANGAN

3

GAMBARAN UMUM
JASA KONSTRUKSI
PROVINSI KALTIM

4

PERENCANAAN &
PENGANGGARAN

5

STRATEGI PENGUATAN



1

DASAR HUKUM



UU 23 /2014 TENTANG PEMDA

Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terbagi habis dalam tingkatan Pemerintahan (Pusat dan Daerah Provinsi/Kab/kota;

Sub Urusan Jasa Konstruksi masuk dalam Urusan Pemerintahan Daerah Bidang PU

UU 2 / 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Pengaturan tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Prov/Kab/Kota pada **bidang Jasa Konstruksi yang telah diselaraskan** dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

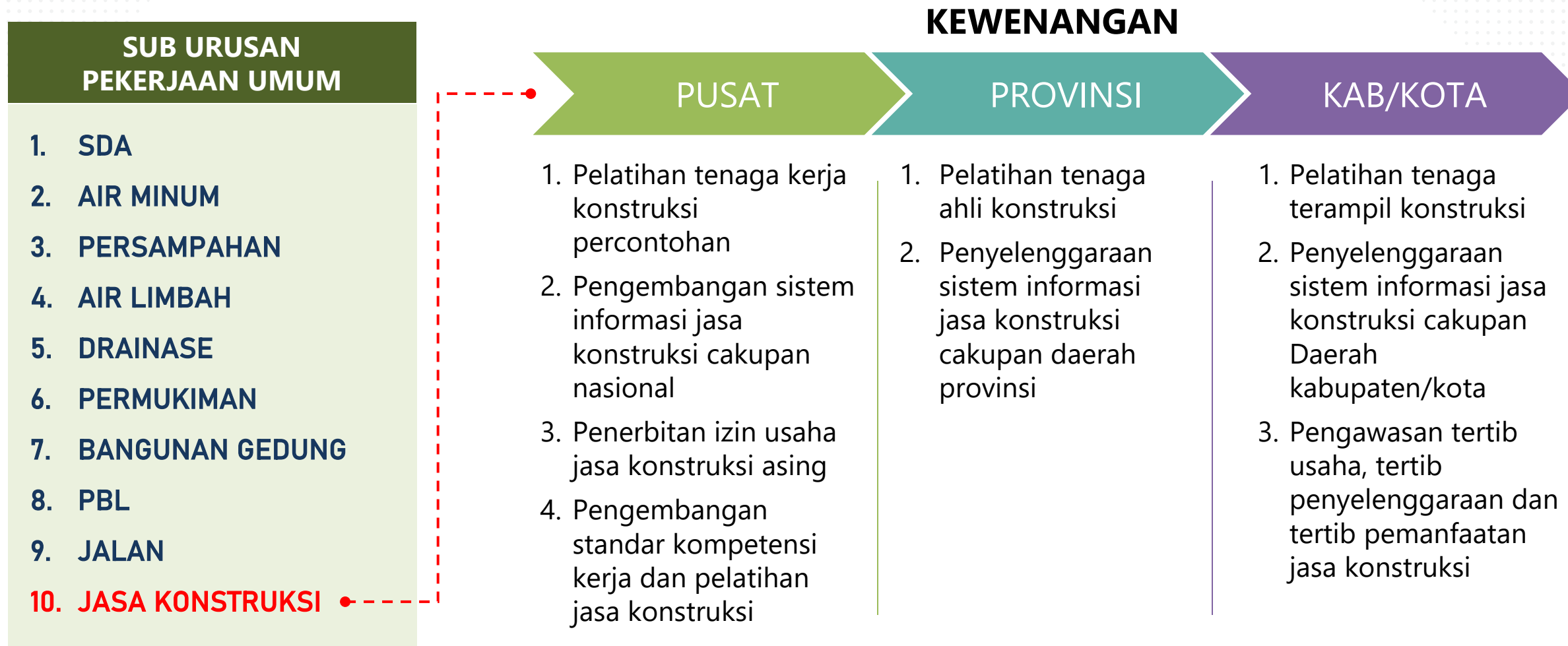
UU 6/2023 TENTANG CIPTA KERJA

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan **kemudahan berusaha**, dan percepatan PSN investasi Pemerintah Pusat dan percepatan PSN

PP 14/2021 TENTANG PER PELAKSANA UU 2/2017 TENTANG JAKON

Peraturan Pelaksanaan terkait Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam bidang Jasa Konstruksi







2

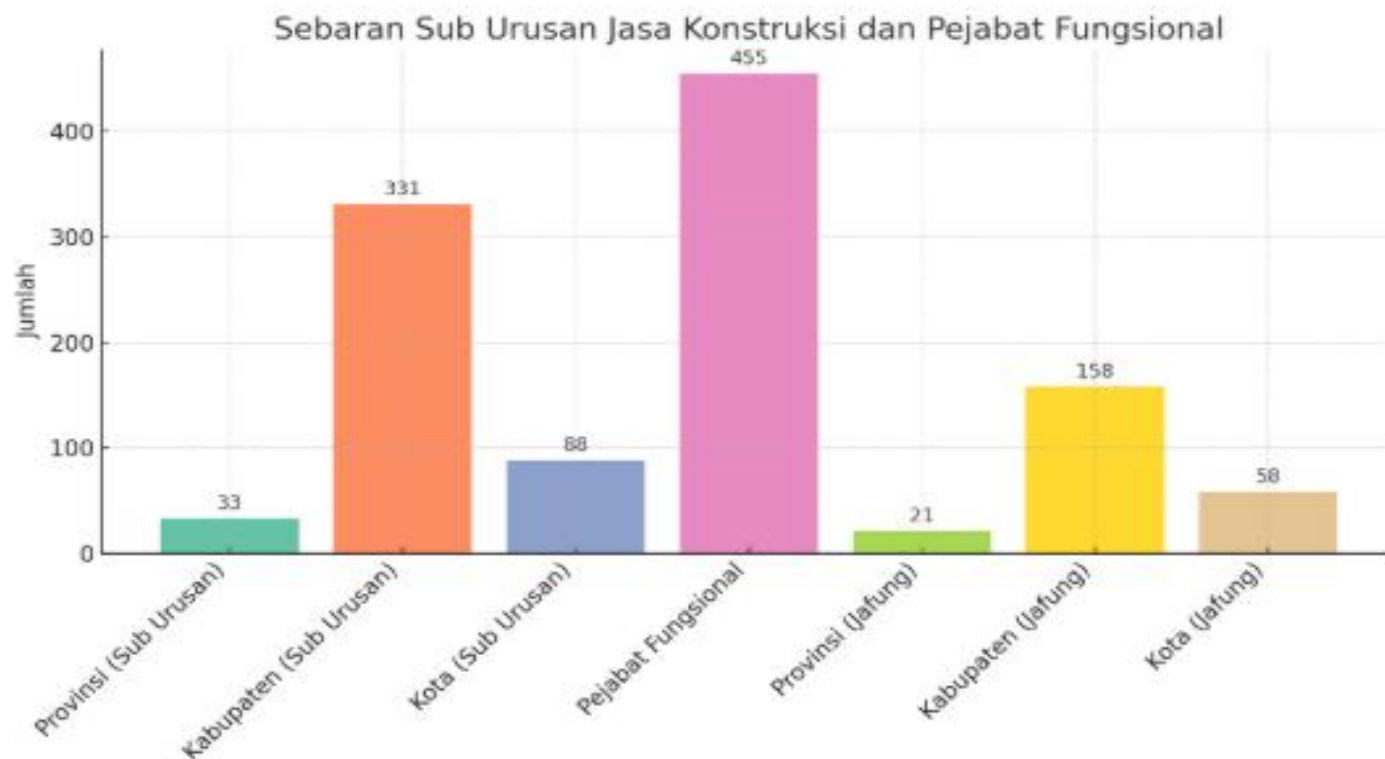
URGENSI & TANTANGAN



TANTANGAN PELAKSANAAN JASA KONSTRUKSI DI DAERAH



- ☐ Banyak daerah yang seharusnya telah menambahkan unit struktural khusus yang menangani urusan jasa konstruksi dalam organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi pekerjaan umum.
- ☐ Bagi Pemerintah daerah yang telah membentuk unit atau bidang yang menangani urusan jasa konstruksi, masih terdapat sejumlah daerah yang belum sepenuhnya memahami peran strategis, tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta dasar hukum dari unit tersebut.
- ☐ Minimnya ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang terampil dan bersertifikat sehingga berdampak pada kualitas hasil pekerjaan konstruksi, tetapi juga berpengaruh terhadap aspek keselamatan, efisiensi biaya, dan keberlangsungan proyek pembangunan di tingkat daerah.
- ☐ Terbatasnya fasilitas pelatihan, kurangnya pendampingan dari lembaga pembina, dan lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan LPJK, Balai Jasa Konstruksi, maupun kementerian teknis.
- ☐ Belum semua Pemda mengalokasikan anggaran atau membentuk program yang secara khusus ditujukan untuk peningkatan kompetensi SDM konstruksi. Padahal, sesuai dengan amanat UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pembinaan dan pemberdayaan tenaga kerja konstruksi merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah.
- ☐ Kesenjangan Kompetensi Antara Pekerja Lokal Dan Kebutuhan Teknis Proyek.
- ☐ Kurangnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, asosiasi, dan masyarakat dalam pelatihan dan sertifikasi TKK
- ☐ Paradigma daerah lebih mementingkan proyek fisik sementara jasa konstruksi bukan fisik dan lebih dari memastikan mutu dalam hal kompetensi SDM/ TKK yang terlibat di proyek pelatihan dan sertifikasi, mutu dan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan produk dalam hal pengawasan ke objek yang terlibat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi



Sebaran Sub Urusan Jasa Konstruksi dan Pejabat Fungsional:

- Jumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki sub urusan jasa konstruksi
- Jumlah pejabat fungsional beserta asal instansinya (provinsi, kabupaten, kota)

Selengkapnya, data dan rincian distribusi ini dapat diakses melalui tautan berikut:

<https://lpjk.pu.go.id/laporan-lpjk/grafik-jumlah-bu-tkk>

- Sampai saat ini, telah terdapat keterlibatan aktif dari pemerintah daerah dalam pengelolaan jasa konstruksi. Sebanyak **33 provinsi, 331 kabupaten, dan 88 kota** di seluruh Indonesia telah memiliki **Sub Urusan Jasa Konstruksi** dalam struktur organisasinya. Ini menunjukkan adanya komitmen daerah dalam memperkuat tata kelola pembangunan infrastruktur melalui kebijakan yang terintegrasi.
- Untuk mendukung pelaksanaan sub urusan tersebut, tercatat terdapat **455 pejabat fungsional pembina jasa konstruksi** yang aktif. Para pejabat ini berasal dari: **21 provinsi, 158 kabupaten, dan 58 kota**.
- Kehadiran pejabat fungsional ini menjadi elemen penting dalam memastikan pelaksanaan urusan jasa konstruksi berjalan profesional, akuntabel, dan sesuai standar kompetensi.



Pembangunan
Infrastruktur
Masif di
Indonesia untuk
mendukung
konektivitas dan
peningkatan daya
saing daerah

Terdapat
kebutuhan
Tenaga Ahli
dan Tenaga
Terampil
Konstruksi lokal

PEMERINTAH DAERAH

Penyediaan Tenaga
Konstruksi melalui
Fasilitasi Pelatihan
Tenaga Ahli dan Tenaga
Terampil Konstruksi,
serta melakukan
pembinaan Usaha Jasa
Konstruksi oleh **Unit
Kerja yang mengampu
Sub Urusan Jasa
Konstruksi di Tingkat
Pemda**

Penggunaan Tenaga
Ahli Dan Tenaga
Terampil Konstruksi
Lokal, Membuka
Lapangan Pekerjaan
Baru Dan Secara
Tidak Langsung
Meningkatkan
Perekonomian
Daerah



3

GAMBARAN UMUM JASA KONSTRUKSI PROVINSI KALTIM



KEBUTUHAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP SUB URUSAN JAKON

Data BUJK se-Provinsi Kalimantan Timur

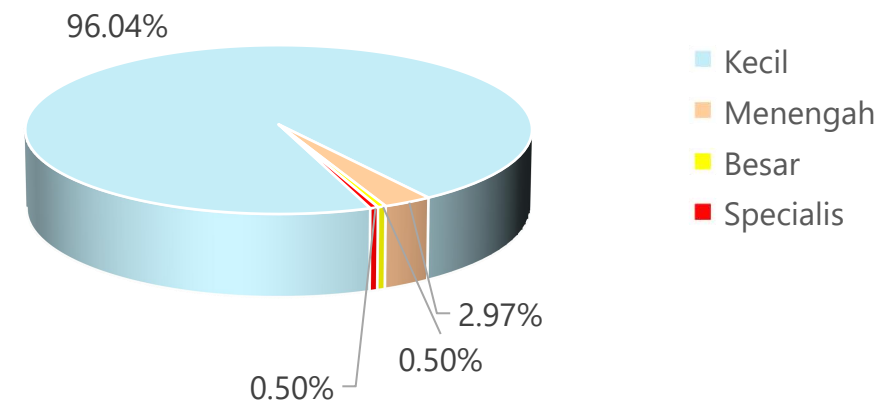
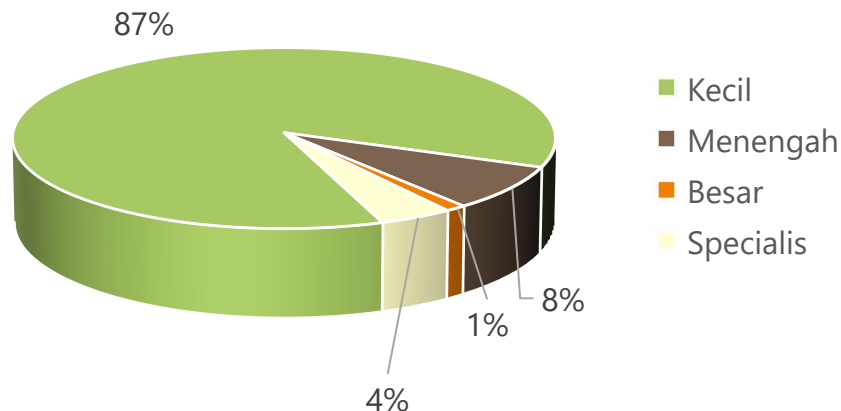
JASA KONSULTAN	404
Kecil (K)	388
Menengah (M)	12
Besar (B)	2
Specialis	2
KONTRAKTOR	3,498
Kecil (K)	3,032
Menengah (M)	280
Besar (B)	41
Specialis	145
PENYEDIA	3,902

Sumber: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (2024)

Ketersediaan Tenaga Ahli Dan Tenaga Terampil Konstruksi Yang Terlatih Dan Tersertifikasi, serta Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang terbina dengan baik menjamin kualitas infrastruktur yang terbangun di Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga dibutuhkan penguatan Kelembagaan terkait implementasi Sub Urusan Jasa Konstruksi.

JASA KONSULTAN

KONTRAKTOR





PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Kabupaten/Kota	Struktur Organisasi			
		Setara Es.3	Setara Es.4	Non Struktural (haNYA TUSI)	Belum Ada
	KALIMANTAN TIMUR	1			
1	Kabupaten Berau		1		
2	Kabupaten Kutai Barat	1			
3	Kabupaten Kutai Kartanegara	1			
4	Kabupaten Kutai Timur	1			
5	Kabupaten Mahakam Ulu	1			
6	Kabupaten Paser	1			
7	Kabupaten Penajam Paser Utara	1			
8	Kota Balikpapan		1		
9	Kota Bontang	1			
10	Kota Samarinda	1			
	TOTAL	8	2	0	0

Sumber:

1. Ditjen Bina Konstruksi, Kementerian PUPR (2024)
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (2024)



KETERSEDIAAN TENAGA JASA KONSTRUKSI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Data Tahun 2023



4

PERENCANAAN & PENGANGGARAN



JASA KONSTRUKSI

KEPMENDAGRI 900.1-2850/2025 TENTANG HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

PROVINSI

KODE					NOMENKLATUR	INDIKATOR	KINERJA	SATUAN
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			
1	03	11	1.01	0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Tersedianya Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Orang
1	03	11	1.01	0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Tersedianya Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Dokumen
1	03	11	1.01	0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	Orang
1	03	11	1.01	0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga
1	03	11	1.01	0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Dokumen
1	03	11	1.01	0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	Orang
1	03	11	1.01	0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Terpantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	Orang
1	03	11	1.01	0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Teridentifikasinya Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	Lembaga
1	03	11	1.01	0020	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Keahlian Konstruksi	Terfasilitasi Pengembangan Kompetensi Keahlian Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Keahlian Konstruksi	Orang
1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi			
1	03	11	1.02	0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Layanan Informasi
1	03	11	1.02	0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Perangkat Pendukung
1	03	11	1.02	0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	Dokumen
1	03	11	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang
1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			
1	03	11	1.03	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan
1	03	11	1.03	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Bangunan Konstruksi
1	03	11	1.03	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga
1	03	11	1.03	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Badan Usaha
1	03	11	1.03	0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	Dokumen



JASA KONSTRUKSI

KEPMENDAGRI 900.1-2850/2025 TENTANG HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

KODE					NOMENKLATUR	INDIKATOR	KINERJA	SATUAN
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			
1	03	11	2.01	0009	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Tersedianya Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	Dokumen
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Orang
1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga
1	03	11	2.01	0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Tersedianya Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	Orang
1	03	11	2.01	0013	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Teridentifikasinya Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	Lembaga
1	03	11	2.01	0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Terantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihnnya	Dokumen
1	03	11	2.01	0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	Dokumen
1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Orang
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Perangkat Pendukung
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen
1	03	11	2.02	0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang
1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Layanan Informasi
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			
1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan
1	03	11	2.04	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Bangunan Konstruksi
1	03	11	2.04	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga
1	03	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Badan Usaha
1	03	11	2.04	0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Dokumen



TA 2025

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	RKPD 2025 (Rp)	APBD 2025 (Rp)
1	Kalimantan Timur	15.549.048.926	15.068.645.624
2	Papua	10.000.000.000	8.353.760.248
3	Kalimantan Tengah	7.000.000.000	5.650.000.000
4	Banten	5.525.000.000	5.525.000.000
5	Jawa Tengah	5.335.641.000	5.335.641.000
6	Kalimantan Selatan	8.316.713.400	5.061.474.000
7	Kalimantan Utara	4.958.352.600	4.958.852.600
8	Jawa Barat	4.862.212.549	4.869.710.263
9	Sumatera Selatan	4.617.100.000	4.617.100.000
10	Lampung	5.535.597.000	4.518.027.000
11	Bali	4.393.185.138	4.300.654.522
12	Jambi	6.169.560.324	3.345.902.572
13	Jawa Timur	1.873.564.393	2.153.914.235
14	Papua Barat	5.200.000.000	2.000.000.000
15	Riau	2.394.324.986	1.777.415.144
16	Nusa Tenggara Timur	415.944.346	1.765.454.000
17	Sulawesi Tengah	1.918.927.200	1.503.856.100
18	Sumatera Barat	4.546.366.000	1.500.704.000
19	Sulawesi Tenggara	1.100.000.000	1.444.861.032
20	Kalimantan Barat	1.200.000.000	1.200.000.000
21	Kepulauan Riau	2.400.000.000	678.814.090
22	Gorontalo	658.872.400	632.692.400
23	Maluku	573.750.000	625.000.000
24	Papua Tengah	-	596.232.277
25	Papua Pegunungan	-	577.700.000
26	DI Yogyakarta	574.992.445	574.028.000
27	Papua Barat Daya	-	450.000.000
28	Sulawesi Barat	-	427.875.000
29	Kepulauan Bangka Belitung	499.999.904	405.500.000
30	Maluku Utara	1.000.000.000	351.328.016
31	Bengkulu	320.000.000	320.000.000
32	Sumatera Utara	4.936.155.080	291.642.000
33	Nusa Tenggara Barat	2.000.000.000	200.000.000
34	Sulawesi Utara	183.999.800	140.892.200
35	Sulawesi Selatan	750.213.800	26.310.000
36	DKI Jakarta	611.743.888	-
37	Papua Selatan	-	-
38	Aceh	-	-
TOTAL		126.953.950.777	91.248.986.323

- Total Pagu RKPD bidang Jasa Konstruksi di Provinsi yang telah terintegrasi ke dalam SIPD sebesar **Rp. 126.953.950.777,-**
- Total Pagu APBD bidang Jasa Konstruksi di Provinsi yang telah integrasi ke dalam SIPD sebesar **Rp. 91.248.986.323,-**
- **Provinsi Kalimantan Timur** memberikan porsi anggaran terbesar sub urusan Jasa Konstruksi TA 2025, dan tidak ditemukan data terkait penganggaran pada sub urusan Jasa Konstruksi pada 3 Provinsi pada Tahun 2025
- Agar Pemerintah Provinsi menyediakan perencanaan dan penganggaran pada sub urusan Jasa Konstruksi dalam rangka mewujudkan masyarakat konstruksi yang baik dan berdaya saing di daerah, serta membuka lapangan pekerjaan.
- Pemerintah Provinsi memberikan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan sub urusan Jasa Konstruksi

Sumber: SIPDKemendagri, 2025



BAB IV
291

Sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kami mendorong Provinsi Kaltim untuk fokus pada Kewenangan Provinsi urusan jasa konstruksi yaitu:

- Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi
- Presentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli

Dalam rangka
pengintegrasian ke
Dokrenda

11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya Kualitas Pengujian Standar Mutu Konstruksi	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (UPTD Lab. Konstruksi)	56,67%	63,34%	298.184.000	70,67%	600.000.000	77,67%	600.000.000	85,01%	600.000.000	92,01%	600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat
		Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	45,00%	51,13%	3.972.400.000	53,91%	4.000.000.000	56,13%	4.000.000.000	58,35%	4.000.000.000	60,57%	4.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat

Urusan Jasa Konstruksi pada Provinsi Kalimantan Timur telah dilaksanakan dengan baik dibandingkan dengan daerah lain secara nasional salah satunya dengan telah diterbitkan **Pergub Kaltim No. 46/2023 ttg Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah**. Namun perlu menekankan pada peningkatan kapasitas tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan bersertifikat untuk menjawab kebutuhan proyek strategis, terutama pembangunan IKN dan kawasan penyangga. Selain itu, badan usaha jasa konstruksi lokal perlu diberdayakan agar mampu bersaing melalui pembinaan, akses teknologi, dan kebijakan afirmasi. Perencanaan juga harus mengintegrasikan data pekerja, badan usaha, dan kebutuhan proyek dalam satu sistem informasi yang terhubung dengan SIPD dan sistem nasional.

Di sisi lain, dukungan terhadap pembangunan infrastruktur strategis harus diselaraskan dengan prinsip konstruksi berkelanjutan, penerapan teknologi digital (Building Information Modelling, prefabrikasi), serta skema pembiayaan alternatif seperti KPBU. Terakhir, aspek tata kelola dan pengawasan mutu, termasuk keselamatan kerja, perlu diperkuat agar pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan berkualitas.





PENGAWALAN PELAKSANAAN LPPD

Permendagri No. 18 Tahun 2020
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli ÷ jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi × 100%	10%
2.	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi			
3.	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi			
4.	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir			
5.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi			
6.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN			
7.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya			
8.	Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi			
9.	Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LPKK)			
10.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli			
11.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi			
12.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
13.	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya			
14.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			

Telah dilakukan revisi melalui Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah namun terkait dengan IKK Output, IKK Outcome, Rumus dan Bobot masih dalam penyusunan draft yang akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri.



5

STRATEGI PENGUATAN



SUB URUSAN JASA KONSTRUKSI DI DAERAH

KEBIJAKAN & REGULASI

- Integrasi dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD/ RTRW)

PENGUATAN KELEMBAGAAN

- Optimalisasi peran Dinas Teknik dengan mendorong penyediaan unit/ bidang yang khusus mengelola jasa konstruksi

PENINGKATAN KAPASITAS

SDM & TENAGA KERJA

- Kerjasama lintas OPD dan percepatan perizinan
- Sinkronisasi Pembangunan dan sinkronisasi Pembangunan
- Memperluas kolaborasi dengan asosiasi jasa konstruksi: mendorong lebih banyak tenaga kerja lokal universitas dan Lembaga memiliki sertifikat kompetensi.

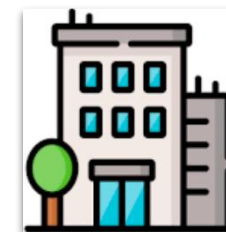
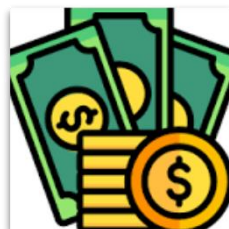
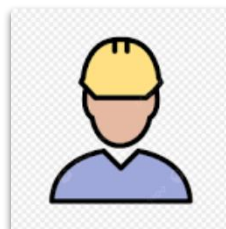
- Pelatihan berjenjang: peningkatan keterampilan pekerja, konsultan, hingga kontraktor daerah.

PENGEMBANGAN EKOSISTEM USAHA JASA KONSTRUKSI LOKAL

- Pemberdayaan kontraktor lokal skala kecil-menengah (UMKM): melalui paket pekerjaan yang sesuai kapasitas/ kabupaten strategis.

PENDANAAN & INVESTASI

- Kebijakan local content: alokasi APBD yang memaksimalkan penggunaan tenaga kerja, material, dan jasa dari daerah
- Proporsional: menjaga agar belanja infrastruktur tetap menjadi prioritas.
- Skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha): membuka ruang investasi swasta untuk proyek infrastruktur daerah.





Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

TERIMA KASIH



www.kemendagri.go.id



[Kemendagri_RI](#)



[kemendagri](#)



[kemendagri](#)